

Pentingnya Kerjasama bagi Peningkatan Mutu Pendidikan

Niken Damayanti

Program Studi Antropologi, Fakultas Seni dan Antropologi Budaya, Universitas Brawijaya

niken.damayanti231@gmail.com

Abstrak

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting di dalam semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Karenanya dibutuhkan sebuah pendidikan yang berkualitas untuk dapat menciptakan individu yang berkualitas pula. Sayangnya, mutu pendidikan yang ada saat ini menggambarkan fakta yang sebaliknya. Ketidaksesuaian kurikulum, kurangnya kualitas sumber daya, sarana prasarana kurang memadai, tingkat prestasi rendah, dan kurangnya kerjasama antar *stakeholder* menjadi faktor penghambat mengapa mutu pendidikan belum dapat berkembang maju. Padahal, dibutuhkan yang namanya partisipasi langsung dan kerjasama semua *stakeholder* guna dapat mewujudkan tujuan bersama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Atau dengan kata lain diperlukan kerjasama nyata agar tidak ada tumpang tindih dimasing-masing fungsi. *Stakeholder* yang berperan di dalam dunia pendidikan antara lain adalah pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Masyarakat merujuk pada orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Sedangkan sekolah merujuk pada siswa, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan perihal pentingnya sebuah kerjasama antar setiap *stakeholder* untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Kata Kunci : *Kerjasama, Mutu Pendidikan, Stakeholder*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Baik itu pendidikan yang bersifat formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan formal mengacu pada pendidikan yang ada di sekolah-sekolah umum. Memiliki jenjang yang jelas, mulai dari sekolah dasar, menengah, atas/kejuruan, hingga tinggi. Pendidikan formal ini cenderung bersifat wajib yang harus diterapkan kepada semua warga negara. Pendidikan nonformal mengacu pada di luar pendidikan formal. Biasanya memiliki karakter yang hampir serupa. Namun pendidikan nonformal cenderung diterapkan pada anak-anak usia dini. Seperti Sekolah Minggu, Taman Pendidikan Al-Quran, kursus, dan bimbingan belajar. Pendidikan nonformal ini juga dijadikan sebagai pendidikan tambahan dan pelengkap untuk pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal mengacu pada pendidikan lingkungan keluarga. Dimulai semenjak anak menjadi bagian dari sebuah keluarga. Memiliki sifat yang berkebalikan dengan pendidikan formal. Cenderung fleksibel namun memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk karakter individu. Dengan kata lain, semua jenis pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Karenanya untuk dapat menciptakan individu yang berkualitas, diperlukan pendidikan yang berkualitas pula.

Sayangnya, mutu pendidikan yang ada saat ini menggambarkan fakta yang sebaliknya. Di Indonesia sendiri, pendidikan masih menjadi sebuah problematika yang belum

rampung. Rendahnya pelayanan, mutu pendidikan dasar dan tinggi, hingga kemampuan baca tulis anak-anak (Widodo, 2016) adalah contoh permasalahan yang masih menjadi perhatian khusus. Hal ini cenderung dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lazim di lingkungan masyarakat. Pola pikir inilah yang juga menjadi penyebab mengapa pendidikan belum bisa mengarah pada kemajuan. Seperti yang dikutip dalam UNDP (2017) dapat dibuktikan dalam peringkat Human Development Indeks (HDI) bahwa Indonesia menempati peringkat 116 (0,694). Jauh berada dibawah Malaysia yang menempati peringkat 57 (0,802). Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia masih belum serius dalam menghadapi dunia pendidikan. Fakta ini sangat menyedihkan melihat pendidikan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas bangsa.

Pendidikan memiliki beberapa poin penting yang sepatutnya untuk diperhatikan. Pertama adalah untuk memberikan pengetahuan. Dengan melalui pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal dapat membuka mata individu dalam kaitannya melihat kehidupan. Menciptakan sudut pandang baru tentang segala aspek yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan sekitar. Kedua adalah untuk karier. Melalui adanya pendidikan individu dapat membantah pemikiran negatif bahwa ada atau tidaknya pendidikan tetap sulit mencari pekerjaan. Pemikiran ini tentu salah karena pendidikan dapat membuka sudut pandang baru dalam melihat karier yang sesuai dengan dirinya. Ketiga adalah membangun sifat dan karakter. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam pengaruhnya sifat dan karakter individu. Pendidikan mengajarkan banyak norma dan nilai-nilai positif yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dengan kata lain membuat seorang individu menjadi lebih manusiawi dari sebelumnya. Keempat adalah meningkatkan kualitas bangsa. Bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam kaitannya kualitas suatu bangsa. Tinggi atau rendahnya bangsa tersebut dapat diketahui dari tingkat pendidikan warga negaranya. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka dapat dipastikan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik bangsa tersebut akan tinggi pula.

Hal utama yang menjadi fokus pembahasan adalah kurangnya kerjasama antar *stakeholder* yang memengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Bahwa *stakeholder* ini dipercaya memiliki fungsi masing-masing dalam kaitannya meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Karakteristik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur mutu suatu pendidikan antara lain adalah kebijakan dan kurikulum yang mengatur suatu pendidikan, kualitas dari sumber daya pendidik, sarana prasarana yang mendukung pendidikan, pengelolaan yang dilakukan, dan hasil prestasi dari siswa didik. Semua karakteristik tersebut membutuhkan adanya peran dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Stakeholder yang dimaksud seperti pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Pemerintah di sini merujuk pada otoritas tertinggi yang mengatur jalannya pendidikan. Memberikan kebijakan serta kurikulum yang digeneralisasikan ke semua sektor. Masyarakat merujuk pada orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Sedangkan sekolah merujuk pada siswa didik, tenaga pengajar, dan kepala sekolah.

PEMBAHASAN

Penilaian Mutu Pendidikan

Dalam memberikan penilaian terhadap tingkat mutu pendidikan, dibutuhkan beberapa karakteristik yang harus terpenuhi. Karakteristik ini didasarkan pada hubungan internal antara sekolah dengan konsep pendidikan. Di mana karakteristik ini bersentuhan langsung dengan proses peningkatan mutu.

Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum

Penilaian mutu pendidikan yang pertama dapat dilihat dari kebijakan dan kurikulum pendidikan. Kebijakan yang dimaksud adalah asas, tujuan, prinsip, target serta cita-cita yang ingin dicapai. Bahwa dalam dunia pendidikan perlu untuk menentukan kebijakan apa yang mampu mengembangkan dan meningkatkan suatu mutu. Tujuan adanya kebijakan dipercaya dapat menciptakan individu yang berkepribadian baik, memiliki norma dan nilai, terampil, bermoral, serta kaya akan pengetahuan. Kebijakan ini tidak semata-mata dibentuk atas kebutuhan dari dalam. Namun penting untuk menghubungkannya dengan aspek-aspek dari luar, seperti halnya pengaruh globalisasi. Munculnya globalisasi membawa banyak dampak disegala aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Dampak ini bisa bersifat positif dan negatif (Mustari & Rahman, 2014) tergantung dari sudut pandang individu. Dampak positif yang mungkin ditimbulkan seperti lahirnya individu yang berkualitas dan berstandar internasional, akses informasi mudah, dapat bersaing secara global, serta perkembangan pengetahuan yang cepat. Sedangkan dampak negatif yang mungkin timbul seperti melemahkan kontrol negara, degradasi kebudayaan, memunculkan golongan-golongan tertentu, dan terlalu bergantung terhadap teknologi. Oleh karenanya penting untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang dapat melindungi individu dari dampak negatif globalisasi

Selain itu, penting kaitannya antara penilaian mutu dengan rancangan kurikulum. Kurikulum ini bisa dianggap sebagai bentuk dari kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahwa hal ini didasarkan atas perkembangan zaman. Melihat pada abad ini fokus pendidikan lebih mengutamakan pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa didik. Jadi kebijakan kurikulum ini harus dibentuk sedemikian rupa menyesuaikan konsep kehidupan. Perlu untuk juga tetap mengingat bahwa pengaruh globalisasi sangat besar kaitannya dengan pendidikan.

Kualitas Sumber Daya Pendidik

Sumber daya pendidik atau guru dan dosen menjadi salah satu faktor penentu dalam menilai tingkat mutu pendidikan. Mempunyai tempat yang sangat krusial dalam melihat apakah tingkat pendidikan tersebut tinggi atau rendah. Jadi bisa dianggap bahwa posisi pendidik ini sulit untuk dapat digantikan dengan yang lain. Guru memiliki beberapa tugas pokok yang membuatnya sangat penting, yaitu pembimbing, pengajar, pengembang, dan pembina (Mudhofir, 2012). Keempat tugas ini sepatutnya bisa terpenuhi dengan baik untuk dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas. Namun hingga saat ini, pembicaraan mengenai kualitas pendidik masih belum mencapai titik temu. Tidak sedikit yang meragukan apakah pendidik tersebut sudah sesuai dengan standarisasi pendidikan atau belum. Hal ini disebabkan karena banyak yayasan yang memunculkan lembaga-lembaga pendidikan yang kurang memadai. Bahwasanya tidak menutup kemungkinan kemunculan lembaga pendidikan ini sebagai bentuk dari proses perekonomian.

Sarana Prasarana Pendidikan

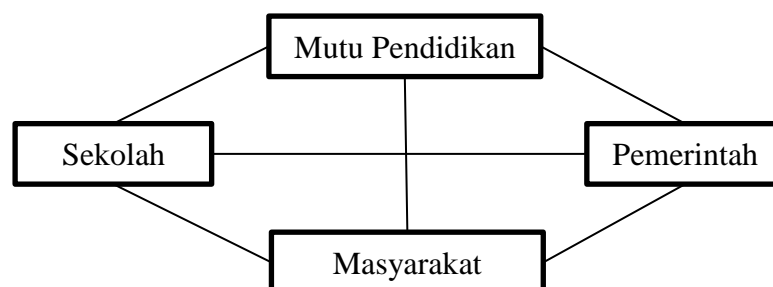
Sarana prasarana memiliki fungsi tersendiri dalam kaitannya peningkatan mutu pendidikan. Dipercaya bahwa sarana prasarana yang memadai akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap pendidikan. Seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dana operasional, tenaga pengajar, serta meja kursi dan sebagainya. Jika semua sarana prasarana terpenuhi dengan baik, dapat memudahkan jalannya proses belajar mengajar. Sehingga dapat merealisasikan tujuan pendidikan bersama. Sayangnya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya saat ini banyak

bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang kurang layak. Terpaksa mendirikan lembaga pendidikan karena didasarkan atas kepentingan ekonomi membuat kualitas pendidikan menjadi menurun. Pada umumnya, sarana prasarana adalah hal utama yang menjadi kendala. Di samping minimnya kualitas tenaga pendidik. Kurangnya persiapan dan kematangan konsep inilah yang mengakibatkan banyak permasalahan muncul silih berganti. Sehingga tidak mengherankan jika ingin meningkatkan mutu pendidikan, harus memenuhi sarana prasarana pendidikannya. perekonomian.

Prestasi

Tinggi rendahnya suatu mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi siswa didik. Semakin banyak siswa didik yang berprestasi, maka mutu pendidikannya dapat dikatakan baik. Prestasi cenderung didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Tergantung dari sudut pandang mana individu itu menilai. Kriteria prestasi yang dijadikan sebagai landasan adalah kemampuan siswa dalam membaca, kemampuan menguasai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan matematika (Mustari & Rahman, 2014). Namun seperti yang dikutip dalam *Kompasiana.com* bahwa kriteria siswa berprestasi tidak hanya dilihat dari sisi akademik, tetapi juga non-akademik (Sulistya, 2015). Seperti misalnya tingkat kedisiplinan, budi pekerti, akhlak, kesopanan, dan sejenisnya. Jadi, pemberian *reward* kepada siswa didik tidak hanya bagi mereka yang memperoleh peringkat satu akademik. Tetapi juga bagi mereka yang memiliki perilaku baik. Dengan kata lain, penilaian mutu pendidikan dapat didasarkan atas prestasi akademik dan non-akademik siswa. Bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tidak akan ada manfaatnya jika siswa didik memiliki prestasi akademik bagus tapi berperilaku buruk, demikian juga sebaliknya. Karena sama-sama dipercaya bahwa pendidikan berfungsi untuk menciptakan individu yang bermoral dan berkepribadian baik. Tidak hanya individu yang pintar dan pandai.

Peran Stakeholder



Bagan 1 Hubungan *stakeholder* terhadap peningkatan mutu pendidikan

Terdapat beberapa *stakeholder* atau rekan kerja yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan. Di mana setiap *stakeholder* tersebut memiliki perannya masing-masing dan saling terikat satu sama lain. Menurut Hetifah, *Stakeholder* sendiri diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dan terpengaruh secara positif maupun negatif terhadap kegiatan dan memiliki suatu kepentingan tertentu (Amalyah, Hamid, & Hakim, 2016). Dengan kata lain, peran yang dimiliki masing-masing *stakeholder* bisa didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu. Baik kepentingan yang menguntungkan diri sendiri maupun yang berada di luar diri tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan *stakeholder* di dunia pendidikan ini akan melahirkan sebuah organisasi. Secara singkat, seperti yang dikutip dalam (Kewuel, 2017)

organisasi adalah tempat berkumpulnya suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bahwa keberadaan organisasi ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Begitu pula dalam bidang pendidikan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika di dalam suatu organisasi akan memunculkan sub organisasi yang terkadang memiliki tujuan berbeda. Padahal penting yang namanya memiliki kerjasama antara organisasi dan sub organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi (Kewuel, 2017). Di dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, adanya kerjasama antar setiap *stakeholder* dalam suatu organisasi tentu akan memberikan penilaian yang berbeda. Karakteristik peningkatan mutu pendidikan yang sebelumnya sudah dibahas akan berjalan baik apabila masing-masing *stakeholder* bergerak sesuai dengan fungsinya. Di samping harus menciptakan relasi dan kerjasama yang kuat agar tidak terjadi ketimpangan. Dengan kata lain semua karakteristik di atas membutuhkan peran setiap *stakeholder* yang terlibat. *Stakeholder* dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah pemerintah sebagai otoritas tertinggi, masyarakat sebagai pengendali, dan pihak sekolah sebagai pelaksana.

Pemerintah

Stakeholder paling utama yang dapat memberikan otoritas penuh terhadap berjalannya suatu program pendidikan adalah pemerintah. Bahwa keberadaan pemerintah dengan berbagai kebijakan dan kurikulum yang dibuat sangat penting bagi kemajuan pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencerdaskan dan menjamin mutu pendidikan warga negaranya (Putri, 2015). Oleh karenanya pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sekiranya dapat mencapai tujuan akhir pendidikan. Sayangnya terkadang kebijakan atau sistem kurikulum yang mereka ciptakan kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut digeneralisasikan ke semua daerah. Padahal kemampuan setiap daerah dalam menerima keotoritasan pemerintah berbeda-beda. Hal inilah yang membuat pengembangan dari pemerintah tidak berjalan sesuai rencana. Perlu adanya interaksi yang jelas antara pembuat kebijakan dengan penerima guna dapat merealisasikan tujuan bersama.

Masyarakat

Stakeholder masyarakat yang terikat dengan dunia pendidikan adalah orang tua atau keluarga dan masyarakat sekitar secara luas. Bahwa kedua komponen ini memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam kaitannya peningkatan pendidikan. Menurut Coleman keluarga dan masyarakat secara luas memiliki pengaruh dalam menentukan prestasi siswa didik (Sulistiyorini, 2018). Bahwasanya keberadaan mereka dapat memberikan nilai yang positif dalam proses keberhasilan suatu pendidikan. Peran orang tua atau keluarga dalam hal ini dapat merujuk pada bentuk dukungan dan rangsangan positif terhadap siswa didik. Dengan demikian, dapat mengembangkan perilaku dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Melihat bahwa orang tua dan keluarga adalah komponen yang bersentuhan secara langsung terhadap keseharian siswa didik. Sedangkan peran masyarakat secara luas dapat merujuk pada pengendalian dan pengamatan bagaimana proses berjalannya pendidikan. Keberadaan mereka bisa sangat menentukan arah dari pendidikan tersebut akan tertuju. Selain itu, pengaruh terbesar dari adanya masyarakat ini berkaitan dengan dana operasional. Bahwasanya hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pemenuhan sarana prasarana. Sayangnya, peran dari *stakeholder* ini masih menunjuk pada tingkat rendah karena kurangnya partisipasi.

Sekolah

Stakeholder sekolah merujuk pada komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai pemegang kedudukan tertinggi, guru atau pendidik sebagai pelaksana kebijakan dan pengajar, serta siswa didik yang menjadi tolak

ukur keberhasilan suatu pendidikan. Ketiga komponen tersebut dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena ketiganya berada di posisi yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan program pendidikan.

Kepala sekolah merupakan kunci utama dalam pewujudan mutu pendidikan. Memiliki peran yang sangat krusial sehingga harus memiliki tujuan yang kuat. Menurut Mulyasa dan Vivi kepala sekolah memiliki beberapa peran penting untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan (Fitrah, 2017), yaitu: (1) mampu untuk membimbing semua komponen yang ada di bawah kepemimpinannya, baik itu tenaga pendidik maupun siswa; (2) mampu menjadi manajer yang mengatur semua fungsi sekolah; (3) mampu mempertanggung jawabkan kegiatan di sekolah; (4) mampu menjadi supervisor yang dapat memberikan pembinaan; (5) mampu menjadi pemimpin kekuasaan tertinggi sekolah yang memiliki tujuan kuat; (6) mampu menjalin hubungan dengan komponen di dalam sekolah maupun di luar; dan (7) memiliki strategi yang jelas dan dapat memotivasi komponen di bawahnya. Semua peran tersebut sepatutnya dapat dimiliki oleh setiap kepala sekolah guna mencapai pengembangan pendidikan. Sayangnya hal tersebut cenderung tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Banyak kepala sekolah yang hanya berpangku tangan menunggu perintah dari otoritas di atasnya.

Peran guru atau tenaga pendidik juga menjadi hal penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam karakteristik peningkatan mutu pendidikan. Bahwasanya guru bisa menjadi ujung tombak dalam keberhasilan pendidikan. Dibutuhkan adanya tanggung jawab yang besar bagi seorang tenaga pendidik untuk bisa mengantarkan siswa didik ke arah yang lebih maju. Di samping siswa juga harus memiliki kompetensi dan motivasi yang kuat dalam proses pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penting adanya kerjasama antar setiap *stakeholder* dalam peningkatan mutu pendidikan. Bahwa antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lain memiliki hubungan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling memengaruhi satu sama lain. Terhubung menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem pendidikan. Jika satu komponen tidak berfungsi, maka akan mengacaukan sistem pendidikan yang ada. Di mana hal itulah yang menjadikan mutu pendidikan sulit untuk berkembang. Diperlukan yang namanya kerjasama nyata antar semua unit agar tidak ada tumpang tindih di masing-masing fungsi. Oleh karena, bukan menjadi hal yang mustahil jika semua *stakeholder* dapat memberikan kontribusi dan membentuk relasi yang kuat karena memiliki tujuan bersama. Maka masing-masing peran sangat dibutuhkan guna dapat mewujudkan cita-cita kecerdasan bangsa. Melalui adanya kerjasama setiap *stakeholder*, bisa menjadi salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping pemenuhan kebutuhan peningkatan mutu yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 158-163.
- Fitrah, M. (2017). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 31-42.

- Kewuel, H. K. (2017). Analisis Antropologi Pendidikan Tentang Penguatan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi dalam Tata Pendidikan Global. *ERUDIO (Journal of Educational Innovation)*, 55-66.
- Mudhofir, A. (2012). Pendidik Profesional: Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Raja Grafindo Persada*.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). Manajemen Pendidikan.
- Putri, D. I. (2015). Retrieved Oktober 6, 2019, from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/ivo_dwiputri/54f85eb3a33311845e8b4ace/peran-pemerintah-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan
- Sulistya, J. (2015). Retrieved Oktober 5, 2019, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/jsulistya/550daafca33311091b2e3dc6/mengkaji-kriteria-siswa-berprestasi>
- Sulistyorini. (2018). Partisipasi Stakeholder Eksternal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 347-372.
- UNDP. 2017. Human Development Report
- Widodo, H. (2016). Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). *Cendekia: Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan*, 293-308.